

Ketegangan Ruang Privat dan Publik dalam Penyelamatan Ekologi: Negara, Perusahaan dan Perempuan Adat

Donny Danardono

Fakultas Hukum & PMLP (Program Magister Lingkungan dan Perkotaan) Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

donnydanardono@yahoo.com

Abstract

This paper examines the tension between private and public sphere in deciding women's role against ecological crisis. State, companies, traditional tribe-based women alliance, village women have their own perception and definition in projecting to save the ecology. Private sphere is where women construct their identity, transmitted ecological spirit to their children, according their phantasy of beauty and fashion based on ecological-friendly product, etc. Public sphere is where women campaign explicitly against company that destroy their environment as form of ecological and gender injustice. The urge to protect the ecology, for women, means the dealing of the tension between domestic and public spheres.

Keywords: dichotomy, private-public sphere, gender and ecological injustice.

Abstrak

Tulisan ini membahas ketegangan dualisme ruang privat dan ruang publik yang muncul dalam penetapan peran perempuan untuk mengatasi krisis lingkungan yang dibuat oleh negara, perusahaan, perempuan adat, dan perempuan desa. Ruang privat adalah tempat seseorang mengkonstruksikan identitasnya. Penetapan identitas perempuan sebagai ibu rumah tangga, penyuka kecantikan, *fashion* dan belanja dilakukan di ruang privat. Sementara ruang publik adalah tempat mempersoalkan berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk ketidakadilan gender dan ketidakadilan lingkungan. Karena itu tuntutan pada perempuan untuk peduli pada lingkungan pada dasarnya merupakan tuntutan yang bermain di antara kedua ruang itu.

Kata kunci: dikotomi, ruang privat, ruang publik, ketidakadilan gender, ketidakadilan lingkungan.

Pendahuluan

Sampai saat ini di Indonesia tak ada sebuah aturan hukum khusus tentang perempuan dan lingkungan. Tapi bukan berarti tak ada kebijakan pemerintah yang tak berdampak pada cara perempuan berhubungan dengan lingkungan. Juga tak berarti tak ada pejabat dan organisasi pemerintah yang tak merumuskan konsep perbaikan mutu lingkungan dan mendorong perempuan untuk aktif dengan konsep itu. Tampaknya, saat membahas hubungan antara perempuan dan lingkungan, sejumlah pejabat pemerintah cenderung menganggap perempuan sebagai ibu rumahtangga, sebuah posisi strategis untuk menyeleksi produk ramah lingkungan bagi rumahtangganya dan juga pendidik utama anak-anaknya untuk ramah lingkungan. Sejumlah perusahaan juga punya cara pandang yang sama saat menjadikan perempuan sebagai bagian dari kampanye lingkungan mereka. Namun beberapa perempuan adat, saat berjuang memperbaiki mutu lingkungan di sekitar mereka, cenderung menunjukkan hubungan organik antara perempuan dan lingkungan. Bagi mereka penindasan lingkungan identik dengan penindasan perempuan.

Tulisan ini hendak membahas ketegangan dualisme ruang privat dan ruang publik yang muncul dalam penetapan peran perempuan untuk mengatasi krisis lingkungan yang dibuat oleh sejumlah pejabat negara Indonesia, pejabat perusahaan swasta, perempuan adat, dan perempuan desa. Ruang privat adalah tempat seseorang mengkonstruksikan identitasnya. Penetapan identitas perempuan sebagai ibu rumahtangga, penyuka kecantikan, *fashion* dan belanja dilakukan di ruang privat. Sementara ruang publik adalah tempat mempersoalkan berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk ketidakadilan gender dan ketidakadilan lingkungan. Karena itu tuntutan pada perempuan untuk peduli pada lingkungan pada dasarnya merupakan tuntutan yang bermain di antara kedua ruang itu. Apakah tuntutan itu membenarkan hubungan keduanya yang terpisah atau membuatnya terkait? Sebuah keterkaitan yang — seperti dikonsepsikan oleh ekofeminisme — menunjukkan, bahwa upaya perempuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan sebenarnya juga merupakan upaya perempuan untuk membebaskan diri dari diskriminasi jender. Karena itu saya tak akan membuat sebuah kesimpulan umum tentang bagaimana mereka mencitrakan peran perempuan dalam lingkungan. Saya hanya akan menunjukkan

kecenderungan bentuk hubungan ruang privat dan publik saat pejabat pemerintah, perusahaan dan perempuan adat menggagas aktifitas perempuan di lingkungan.

Perempuan sebagai “Ibu Rumah Tangga”

Website Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan, bahwa Dharma Wanita Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada 3 Juni 2003 mengadakan seminar bertema “Peran Perempuan dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup” untuk menyambut hari lingkungan hidup. Lima tokoh perempuan dan seorang pejabat pemerintah menjadi pembicara dalam seminar itu. Namun, penulis website itu menunjukkan, bahwa gagasan yang lebih menyeluruh tentang peran perempuan dalam lingkungan adalah yang di sampaikan oleh Masnellyarti Hilman, Deputi VII KLH. Ia menunjukkan kaitan antara peran perempuan sebagai ibu rumahtangga dan upaya memperbaiki kualitas lingkungan hidup Indonesia yang harus dimulai dari lingkungan terkecil masyarakat, yaitu rumahtangga:

Hal ini kemudian lebih menyeluruh disampaikan oleh ibu Masnellyarti Hilman Deputi VII KLH, yang menitikberatkan pembicaraan mengenai mulai hancurnya ekosistem lingkungan di Indonesia. Oleh sebab itu peran serta pelestarian lingkungan hidup harus dimulai dari rumah dengan memperhatikan permasalahan air, energi dan sumber daya alam lainnya yang berada di seputar lingkungan kita yang terdekat yaitu rumah tangga. Peran perempuan dan ibu rumah tangga sangat besar di sana.¹

Pendapat yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh Linda Amalia Sari Gumelar—Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak—dalam sambutannya di Seminar Nasional “Peran Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang diadakan di Surakarta pada 14 Mei 2012. Menurutnya ibu adalah orang yang mampu menyeleksi penggunaan produk-produk ramah lingkungan untuk kebutuhan rumahtangganya. Selain itu ibu adalah pendidik utama anak-anaknya untuk menjadi generasi yang ramah lingkungan:

Perempuan mempunyai peran dominan dalam penentuan barang konsumsi rumah tangga, peran yang dapat dilakukan

perempuan adalah menentukan produk rumah tangga yang ramah lingkungan. Dalam rangka menjalankan peran ini perlu dikembangkan pendidikan kesadaran dan pengetahuan bagi perempuan tentang produk apa saja yang termasuk dalam kategori ramah lingkungan. Perempuan atau Ibu merupakan media edukasi pertama dan utama bagi anak-anaknya. Melalui ibu, pendidikan dan penyadaran tentang kepedulian terhadap lingkungan dapat ditanamkan pada anak-anak sejak dini. Dari penerapan pola hidup ramah lingkungan yang dilakukan dalam sebuah keluarga, anak akan terbiasa dalam menjaga lingkungannya. Jika kebiasaan dan kesadaran ini mengakar dalam diri anak-anak maka di masa depan akan terbentuk generasi yang peduli pada lingkungan.²

Dalam pidatonya itu Ibu Menteri juga menyinggung tentang sebuah organisasi perempuan yang dibentuk oleh Ibu Negara untuk melaksanakan program pemerintah "Menanam 1 Milyar Pohon". Organisasi itu bernama "Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara". Ia mewadahi tujuh organisasi perempuan, yakni SIKIB (Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu), KOWANI (Konggres Wanita Indonesia), Dharma Wanita Persatuan, Dharma Pertiwi, Tim Penggerak PKK, Bhayangkari, dan Aliansi Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Jadi melalui "Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara" ini pemerintah memobilisasi para istri menteri, pegawai negeri sipil, tentara, polisi, berbagai organisasi ibu di tingkat Kelurahan dan RT/RW, dan Aliansi Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan (APPB) yang ada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup³ untuk peduli pada perbaikan mutu lingkungan.

Uraian di atas menunjukkan, bahwa kementerian KLH, Menteri Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Ibu Negara mengkonstruksikan peran perempuan dalam mewujudkan dan memelihara lingkungan hidup yang bermutu berdasarkan posisi perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga. Ini adalah sebuah konstruksi yang didasarkan pada pemisahan ruang privat dari ruang publik. Sebagai istri dan ibu rumah tangga, perempuan mewujudkan kelestarian lingkungan dan memeliharanya dari rumah tangga (ruang privat). Dengan kata mereka tak menganggap ada hubungan antara penindasan lingkungan dengan penindasan gender. Bagi mereka persoalan lingkungan tak perlu memunculkan tafsir baru tentang status



gender perempuan.

Perempuan dalam “Bisnis Hijau”

Perusahaan swasta juga kerap menjadikan perempuan yang merupakan tokoh masyarakat sebagai duta lingkungan untuk mendorong perempuan perkotaan bersikap ramah lingkungan. Melalui perempuan sebagai duta lingkungan itu mereka mengidentikkan perempuan perkotaan dengan *fashion*, kecantikan dan konsumerisme. Pernyataan seperti ini dilontarkan oleh Putri Lingkungan Indonesia 2009, Zuktiatul Hafiza, pada acara *Green Society: Be Part of the Solution* di Hotel Borobudur, Jakarta 23 April 2010 lalu. Acara ini disponsori oleh Media Group, Kementerian Kehutanan, Kementerian KLH, Artha Graha Peduli. Menurut Zuktiatul Hafiza:

gaya hidup perempuan yang identik dengan *fashion*, belanja, atau kecantikan, perlu diubah agar lebih aman bagi bumi yang semakin panas. Kerusakan bumi bisa dikurangi perlahan, jika lebih banyak lagi partisipasi masyarakat kota. Fashion misalnya, kaum perempuan bisa mulai menggunakan produk daur ulang. Sederhananya saja, menggunakan produk lokal juga bentuk kontribusi untuk menyelamatkan bumi. Bayangkan, jika *fashion* selalu mengandalkan produk impor. Berapa besar bahan bakar dan polusi yang ditimbulkan saat pengiriman produk dari berbagai negara.⁴

The Body Shop Indonesia—sebuah perusahaan kosmetik internasional—pada tanggal 21 April 2013 mengkaitkan peringatan hari Kartini dengan hari bumi. Tapi sesungguhnya perusahaan ini tak mengkaitkan perjuangan untuk bebas dari diskriminasi patriarki

(hari Kartini) dengan pembebasan bumi (lingkungan) dari penindasan manusia. Sebab Suzy Hutomo, CEO The Body Shop Indonesia, menyatakan bahwa sebagai ibu rumahtangga perempuan bisa mendidik putra-putrinya untuk menjadi generasi yang lebih peduli pada lingkungan:

perempuan yang berperan sebagai manajer rumah tangga mempunyai andil dalam menanggulangi dan mencegah masalah lingkungan. Salah satu masalah lingkungan tersebut adalah sampah plastik, yang diperoleh dari berbelanja di toko retail, maupun saat membeli makanan dan minuman kemasan. Ayolah, saatnya kita harus memulai dengan 3R, *reduce, reuse, dan recycle*.⁵

Tampak, dari kedua kutipan tersebut, bagaimana perusahaan-perusahaan itu sembari tetap mengidentikkan perempuan perkotaan dengan *fashion*, kecantikan, konsumerisme, dan ibu rumahtangga juga mendorong mereka bersikap ramah lingkungan dan mendidik anak-anaknya untuk ramah lingkungan. Jadi perusahaan-perusahaan itu hanya menghimbau perempuan-perempuan perkotaan untuk peduli pada krisis lingkungan, bukan pada berbagai bentuk penindasan gender yang mereka alami. Barang tentu himbauan seperti ini dibuat berdasarkan dualisme ruang privat dan ruang publik.

Strategi Perempuan Adat dan Desa untuk Lingkungan

Pada tanggal 15 April 2013 Aleta Baun (50 tahun)—seorang perempuan adat Molo, Timor Tengah, Nusa Tenggara Timur—menerima penghargaan *Goldman Environmental Prize* 2013 atas jasanya menyelamatkan alam dan kebudayaan komunitas adat Molo itu. *Goldman Environmental Prize* adalah sebuah lembaga di San Francisco yang setiap tahunnya menganugerahi individu dan lembaga dari seluruh penjuru bumi ini berdasarkan jasa-jasanya di gerakan ekonomi hijau, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, dan promosi pola konsumsi yang ramah lingkungan. Dewan juri internasional menyeleksi para penerima penghargaan ini berdasarkan nominasi rahasia yang diserahkan oleh jaringan kerja organisasi-organisasi dan orang-orang yang bergerak di bidang lingkungan hidup.⁶ Aleta Baun, bersama dengan warga desanya, sejak tahun 1990-an berjuang melawan dua perusahaan penambang

marmer di gunung Mutis. Orang-orang Timor menganggap gunung itu sebagai sumber kehidupan mereka. Di situ mereka berburu, menanam berbagai tanaman pangan, obat, dan pewarna kain tenun. Gunung itu juga merupakan sumber air mereka. Itu sebabnya mereka menjalin hubungan spiritual dengan gunung itu. Mereka memberi nama marga berdasarkan tanah, air, batu, dan pohon yang ada di gunung itu. Karena itu mereka menganggap kedua perusahaan penambang batu marmer itu bukan hanya menghancurkan sumber daya alam, tapi juga identitas diri mereka.⁷

Aleta Baun kerap mendapat ancaman pembunuhan dari kedua perusahaan penambang marmer itu dan pemerintah daerah. Ia pernah harus berhari-hari menyembunyikan diri di hutan bersama bayinya. Puncak perlawanan itu adalah Aleta Baun menggerakkan sekitar 150 perempuan desanya untuk menenun kain adat di areal-areal penambangan marmer itu. Dengan menenun mereka menduduki areal-areal penambangan marmer itu. Pendudukan yang berlangsung selama setahun. Akhirnya pada tahun 2010 kedua perusahaan itu menghentikan penambangan marmer. Kini Aleta Baun dan warga desanya memetakan wilayah adat mereka agar kelak pemerintah dan perusahaan tak menyerobotnya lagi. Perjuangan Aleta Baun itu tak hanya berbentuk penggerakan 150-an perempuan adat berdasarkan identitas gender mereka sebagai penenun kain adat untuk melawan perusahaan-perusahaan penambang marmer, tapi juga menukar identitas gender para perempuan ini dengan para pria di komunitas adat mereka. Saat para perempuan itu berjuang di ruang publik untuk memperoleh keadilan lingkungan bagi diri sendiri dan komunitas adatnya, para pria itu bekerja di ruang privat untuk memasak, mengasuh anak dan membersihkan rumah. Mereka, secara pragmatis, menukar identitas dan peran gender yang ada di ruang privat dan publik itu. Karena itu bagi mereka, kedua ruang itu tak terpisah secara dikotomis, tapi terkait:

Kaum perempuan secara tradisional bertanggung jawab untuk mencari makanan, zat pewarna, dan obat-obatan dari gunung. Penting bagi mereka untuk memimpin kampanye ini. Dalam suatu pembalikan peran, sementara kaum perempuan melakukan protes di area penambangan, kaum pria memberikan dukungan rumah tangga di dalam rumah dengan

memasak, membersihkan rumah, dan menjaga anak-anak.⁸

Siti Rofi'ah dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur memiliki pengalaman yang kurang lebih sama dengan Aleta Baun.⁹ Ia adalah pejuang kemandirian pangan bagi komunitas desanya. Perjuangan kemandirian pangan suatu komunitas juga merupakan perjuangan memperbaiki mutu lingkungan hidup di sekitarnya. Kisah Siti Rofi'ah ini bermula dari penerapan revolusi hijau pada tahun 1983 di desa mereka, di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sejak itu warga desa yang semula berkebun itu beralih ke bersawah. Mereka yang semula menanam jagung, pisang dan berbagai jenis umbi beralih menanam padi kualitas unggul berdasarkan prinsip-prinsip bercocok tanam modern revolusi hijau. Mereka menganggap menanam padi lebih menguntungkan dan karena itu secara bertahap mereka berhenti menanam jagung, umbi-umbian dan pisang. Pada tahun kelima, mereka mendapat tawaran untuk menggunakan pupuk kimia dan pestisida yang harus mereka beli dari perusahaan agro industri. Dengan pupuk kimia itu panen padi mereka berlimpah. Mereka, selama beberapa tahun, menjadi tergantung pada pupuk kimia yang harus mereka beli itu. Mereka tak lagi membuat dan menjual pupuk organik. Tapi pestisida yang mereka beli dalam satu paket dengan pupuk kimia itu bukan hanya membunuh segala macam serangga hama itu, tapi juga berbagai musuh alamnya dan bahkan memperkuat daya tahan beberapa jenis serangga hama. Sawah mereka diserang oleh beragam hama baru seperti wereng coklat, hama putih, dan penggerek batang. Mereka tak siap dengan itu dan kerap gagal panen. Maka, mereka hutang beras ke pengijon untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan harus melunasinya dengan padi yang mereka tanam. Gagal panen itu juga memunculkan berbagai masalah sosial lain: anak-anak berhenti sekolah, orang tua bertengkar, dan kehidupan menjadi buruk.

Keterpurukan sosial itu mendorong Siti Rofi'ah mengumpulkan ibu-ibu untuk arisan beras. Semula hanya 10 ibu yang menjadi anggota kelompok arisan itu, tapi segera jumlahnya bertambah. Melalui arisan ini, setiap bulannya, ibu-ibu dan keluarganya itu selalu kecukupan beras. Mereka bahkan bisa menjual kelebihanannya untuk mendapatkan uang tambahan. Kemudian atas persetujuan mereka, sebuah LSM memberikan dampingan berupa program-program kerja

yang memberikan penghasilan uang. LSM itu juga mengajari mereka membuat pupuk organik dan pupuk kandang. Mereka mengumpulkan kotoran sapi, kambing dan kerbau untuk bahan pupuk itu. Mereka gunakan pupuk organik dan kandang itu untuk sawah mereka dan sebagiannya mereka jual. Pupuk organik tak membunuh musuh-musuh alami berbagai hama itu dan akan mencegah serangan hama yang membuat gagal panen. Setelah itu Siti Rofi'ah mulai berjalan ke gunung-gunung untuk mencari sorgum merah, hitam dan putih. Sorgum dikenal sebagai bahan pangan ke-5 setelah padi, gandum, jagung dan jelai (juwawut).¹⁰ Selama ini, menurut Siti Rofi'ah, warga desanya menganggap sorgum sebagai tanaman liar dan tak pernah merawatnya. Kini ia tak ingin warga desanya tergantung pada beras sebagai makanan pokok yang membuat mereka makin tergantung perusahaan-perusahaan agro industri benih padi, pupuk kimia dan pestisida; dan di desanya pupuk kimia dan pestisida itu terbukti menimbulkan berbagai hama baru yang menggagalkan panen. Kini warga desanya dan desa-desa di kecamatan lain kembali lagi berkebudan dengan menanam jagung, umbi-umbian, pisang dan sorgum. Karena itu menurut Siti Rofi'ah:

Seharusnya pemerintah menduduk pangan lokal ini, karena ketergantungan orang pada beras hanya berujung pada bantuan raskin (beras untuk orang miskin) dan membuat warga malas dan manja. Melepaskan kebun berarti melepaskan hidup.¹¹

Di tengah keterpurukan sosial-ekonomi karena kegagalan panen padi yang ditanam secara modern dengan pupuk kimia dan pestisida itu, Siti Rofi'ah menggerakkan ibu-ibu untuk mengadakan arisan beras. Arisan beras ini bukan hanya menyelamatkan krisis pangan di keluarga mereka, tapi juga memberi mereka kemandirian ekonomi. Setelah itu mereka kembali menggunakan pupuk organik dan kandang yang tak merusak tanah dan tak mengundang berbagai hama padi yang pernah menggagalkan panen. Akhirnya Siti Rofi'ah mendorong warga desanya membudidayakan sorgum—tanaman lokal yang pernah mereka anggap sebagai tumbuhan liar namun sebenarnya lebih tahan hama—sebagai bahan pangan pengganti padi. Tak lama setelahnya warga desa-desa dari kecamatan lain juga membudidayakan sorgum. Begitulah bagaimana

Siti Rofi'ah dan kelompok arisan ibu-ibu itu membebaskan warga desa itu dari krisis pangan, mengembalikan pemakaian pupuk organik dan kandang, memperkenalkan sorgum (tanaman lokal pengganti padi sebagai makanan pokok), dan mengembalikan keseimbangan lingkungan di desanya. Ibu-ibu ini telah menyelamatkan krisis pangan di rumahtangga (ruang privat) masing-masing dengan mengubah cara kerja para pria dan perempuan di kebun dan sawah (ruang publik), dan juga mengganti padi dengan sorgum. Perubahan-perubahan ini akhirnya memperbaiki kesimbangan lingkungan di desa itu. Kegiatan ibu-ibu itu membuat ruang privat dan ruang publik terkait.

Ekofeminisme: Keterkaitan Ruang Privat dan Publik

Uraian di atas menunjukkan bagaimana pejabat pemerintah, perusahaan swasta, perempuan adat, dan perempuan desa memahami hubungan antara perempuan dan lingkungan. Pejabat pemerintah dan perusahaan swasta cenderung hanya peduli pada krisis lingkungan yang berdampak buruk bagi seluruh manusia tak memandang identitas gender, orientasi seksual, kelas, status sosial, atau agama mereka. Mereka tak menganggap krisis itu secara khusus dan langsung berdampak pada perempuan berdasarkan konstruksi tradisional gendernya sebagai ibu rumahtangga. Mereka justru menganjurkan perempuan—berdasarkan konstruksi gendernya itu—untuk menyeleksi barang-barang yang ramah lingkungan untuk diri sendiri dan rumahtangganya, dan mengajarkan perilaku ramah lingkungan ke anak-anaknya. Bagi mereka dominasi terhadap alam tak ada hubungannya dengan dominasi terhadap perempuan. Sebaliknya perempuan adat dan desa cenderung menganggap krisis lingkungan berdampak langsung pada diri sendiri sebagai perempuan dan orang-orang lain di sekitar mereka. Hilangnya sumber mata air dan beras akan berdampak pada kehidupan rumahtangga dan konstruksi gender perempuan tersebut. Maka mereka menunda atau tetap menggunakan konstruksi gender tradisionalnya itu untuk melawan perusahaan-perusahaan tambang yang merusak lingkungan, mencukupi kebutuhan beras bagi keluarganya, mengembalikan penggunaan pupuk kandang dan organik, dan mendorong warga desanya untuk menjadikan sorgum, tanaman pangan lokal itu, sebagai bahan makanan pokok pengganti beras.

Bila diletakkan dalam konteks ruang privat dan publik, beberapa pejabat pemerintah dan perusahaan swasta itu cenderung mendorong perempuan untuk memperbaiki mutu lingkungan dari ruang privat. Jadi, mereka tak hanya membenarkan anggapan tentang terpisahnya ruang privat dari ruang publik, tapi juga posisi perempuan di ruang privat tersebut sebagai ibu rumahtangga. Sebaliknya dalam perlawanannya, perempuan adat dan desa itu—yang menganggap krisis lingkungan dan pangan berdampak langsung pada diri mereka sebagai perempuan dan orang-orang lain di sekitar mereka—berusaha mengkaitkan ruang privat dan publik. Pengkaitan kedua ruang itu mereka lakukan dengan cara menduduki areal penambangan marmer sambil menenun kain adat, mengadakan arisan beras, mengganti pupuk kimia dengan pupuk kandang dan organik, dan mengganti tanaman padi dengan sorgum sebagai makanan pokok. Kadang mereka melakukan perjuangan di ruang publik itu dengan tetap mempertahankan identitas gender tradisional mereka sebagai penenun kain adat. Tapi kadang mereka menundanya sama sekali, yaitu dengan membuat argumentasi-argumentasi rasional tentang tentang pupuk kandang yang lebih ramah lingkungan daripada pupuk kimia; pembudidayaan tanaman lokal sorgum sebagai pengganti padi yang akan membebaskan para petani dan keluarganya dari dominasi perusahaan-perusahaan argo industri. Menurut mereka sorgum juga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan padi hasil revolusi hijau.

Anggapan tentang keterkaitan ruang privat dan publik ini memudahkan para perempuan itu saat mengadakan perlawanan terhadap penindasan lingkungan dan gender. Dengan mempersoalkan kepastian identitas gendernya mereka bisa mengatasi krisis lingkungan dan ekonomi. Jadi bisa dikatakan, bahwa para perempuan adat dan desa itu menerapkan ekofeminisme, sementara kebijakan beberapa pejabat pemerintah dan perusahaan itu ada di luar agenda ekofeminisme. Ekofeminisme adalah sebuah gerakan sosial yang menggabungkan bentuk dan dampak diskriminasi androsentrisme (etika yang memusatkan diri pada kepentingan pria) terhadap perempuan dan alam. Vandana Shiva—seorang aktivis lingkungan dan penentang globalisasi dari India—menganggap, bahwa konsep sains dan pembangunan Barat yang disebarkan secara global itu bersifat patriarkal, yakni menganggap alam, perempuan, masyarakat adat dan petani sebagai tidak produktif, karena tak sesuai dengan ide tentang kemajuan yang ada dalam konsep

tentang teknologi dan komoditi:

The economic biases and values against nature, women and indigenous people are captured in this typical analysis of the ‘unproductiveness’ of traditional natural societies [...]. The assumptions are evident: nature is unproductive; organic agriculture based on nature’s cycles of renewability spells poverty; women and tribal and peasant societies embedded in nature are similarly unproductive, not because it has been demonstrated that in cooperation they produce less goods and services for needs, but because it is assumed that ‘production’ takes place only when mediated by technologies for commodity production, even when such technologies destroy life. A stable and clean river is not a productive resource in this view: it needs to be ‘developed’ with dams in order to become so. Women, sharing the river as a commons to satisfy the water needs of their families and society are not involved in productive labour: when substituted by the engineering man, water management and water use become productive activities. Natural forests remain unproductive till they are developed into monoculture plantations of commercial species.¹²

Walaupun ekofeminisme adalah sebuah wacana tentang terkaitnya penindasan terhadap alam dengan penindasan terhadap perempuan, tapi ekofeminisme adalah sebuah mazhab pemikiran dan gerakan yang beragam, karena dibentuk oleh keberagaman ideologi pembentuk feminisme itu sendiri: feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme kultural, atau postfeminisme, dan lain-lain. Karena itu Chris J. Cuomo—profesor filsafat dan studi perempuan di Universitas Georgia, Amerika Serikat—menganggap istilah ekofeminisme terlalu umum. Istilah ini, menurutnya, tidak menunjukkan keberagaman bentuk dan fungsi penindasan terhadap perempuan maupun keberagaman strategi perlawanannya berdasarkan gender, orientasi seksual, ras, etnisitas, agama, atau nasionalisme. Tak ada sebuah tujuan umum yang sama dari beragam feminisme itu dalam membela perempuan dan alam. Itu sebabnya Chris J. Cuomo lebih suka menyebut diri sebagai feminis-ekologis ketimbang ekofeminis. Dengan istilah feminis-ekologis itu ia mau menunjukkan strategi feminis tertentu dalam membela diri dan alam dari beragam bentuk dan fungsi penindasan itu.¹³

Saya tak akan membahas beragam ekofeminisme ini dan cara pandangnya terhadap relasi antara perempuan dan alam. Saya hanya akan menunjukkan, bahwa karena setiap aliran dalam ekofeminisme itu menganggap penindasan terhadap perempuan terkait dengan penindasan terhadap alam, maka gerakan beberapa perempuan adat dan desa, seperti yang saya tunjukkan di atas, dalam memperbaiki kualitas lingkungan itu merupakan sebetulnya ekofeminisme tertentu. Tapi saya kesulitan untuk mengkategorikan kebijakan beberapa pejabat perempuan di pemerintahan dan perusahaan swasta itu sebagai bentuk ekofeminisme tertentu. Karena mereka tak menganggap penempatan perempuan sebagai ibu rumahtangga di ruang privat itu merupakan strategi patriarkal untuk membuat perempuan tergantung secara ekonomis dan psikologis pada pria. Mereka cenderung menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar, mulia dan bahkan sebagai peluang perempuan untuk mengajarkan perilaku ramah lingkungan kepada anak-anaknya. Karena itu mereka cenderung menganggap ruang privat dan publik terpisah. Mereka tak menganggap bahwa ruang privat dibentuk dalam suatu diskursus di ruang publik dan sebaliknya ruang publik mengandaikan individu-individu dengan identitas-identitas tertentu yang dibentuk di ruang privat. Saya bahkan sulit mengkategorikan pandangan mereka itu sebagai feminisme liberal, karena bagaimana pun feminisme liberal meyakini ada relasi antara ruang privat dan publik saat mereka meminta pemerintah membuat berbagai peraturan khusus tentang tindakan afirmatif (*affirmative action*) dan aturan pidana, misalnya UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), yang bisa melindungi perempuan saat membentuk identitas diri di ruang privat.

Penutup

Tulisan ini menunjukkan bagaimana beberapa pejabat pemerintah dan perusahaan swasta memisahkan ruang privat dari ruang publik saat meminta perempuan berperan untuk memperbaiki mutu lingkungan. Saya hanya bisa menduga, bahwa mereka tak bisa menghindari berbagai peraturan yang menggariskan peran gender tradisional pria dan perempuan. Misalnya mereka tak bisa menghindari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan istri sebagai ibu rumahtangga dan suami sebagai kepala rumahtangga (Pasal 31 Ayat 3). Sebaliknya perempuan adat dan desa mempersoalkan ketegangan

pemisahan ruang privat dan publik, karena, sebagai perempuan, mereka menjadi korban langsung dari kerusakan lingkungan akibat penambangan marmer atau revolusi hijau itu. Bahkan, sebagai orang yang ditempatkan di ruang privat, mereka juga mengetahui ancaman yang dihadapi oleh keluarga dan orang-orang di sekitar mereka karena kerusakan lingkungan tersebut. Pembahasan di atas hanya bisa untuk menunjukkan sebuah kecenderungan umum tentang bagaimana kira-kira pejabat perempuan di pemerintahan, perusahaan, perempuan adat dan desa bereaksi terhadap kerusakan lingkungan. Pejabat perempuan di pemerintahan dan desa tampaknya tidak bisa begitu saja menghindari peraturan hukum yang memisahkan ruang privat dan publik, seperti Pasal 31 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebaliknya perempuan adat dan desa yang merupakan korban langsung dari kerusakan lingkungan bisa secara luwes mempersoalkan dan bermain dengan anggapan tentang keterpisahan ruang privat dan publik. Masih dibutuhkan sebuah penelitian dengan responden yang lebih banyak dan metode pengumpulan data yang beragam, seperti wawancara, untuk bisa membuat sebuah kesimpulan konseptual yang umum.

Referensi

- Amiruddin, Marianna, "Sorgum dan Sera'e Di Tangan Dua Perempuan Pejuang Pangan", www.jurnalperempuan.org/dua-perempuan-pejuang-pangan, diunduh pada 20 Desember 2013.
- Cuomo, Chirs J., 1998, *Feminism and Ecological Communities: An Ethic of Flourishing*, London, Routledge.
- Gumelar, Linda Amalia Sari, 2012, *Sambutan pada acara Seminar Nasional Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Surakarta, 14 Mei.
- Shiva, Vandana, 1988, *Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India*, London, Zed Books Ltd.

Koran dan Internet

- "Gaya Hidup Perempuan Ramah Lingkungan", *Kompas female*, Senin, 26 April 2010
- "Empat Pejuang Lingkungan Hidup Indonesia Pemenang Goldman Prize", *Republika*, 20 April 2011
- "Mama Aleta, Peraih Goldman dari Pegunungan Molo", *Tempo.co*, Senin, 15 April 2013.
- "Perempuan Harus Peduli Lingkungan", *Tempo.co*, Selasa 23 April 2013.
- "Laporan Khusus: Sorgum, Potensi yang Nyaris Tak Tersentuh", *Suara Pembaruan*, 4 Juni 2013.

“Seminar Dharma Wanita Kementerian Lingkungan Hidup dalam Memperingati Hari Lingkungan”, www.menlh.go.id, diunduh pada 5 Desember 2013.

Catatan Belakang

- 1 “Seminar Dharma Wanita Kementerian Lingkungan Hidup dalam Memperingati Hari Lingkungan”, www.menlh.go.id, diunduh pada 5 Desember 2013.
- 2 Linda Amalia Sari Gumelar, 2012, *Sambutan pada acara Seminar Nasional Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Surakarta, 14 Mei.
- 3 APPB dibentuk pada 28 April 2004 oleh beberapa kelompok perempuan yang bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk mendorong perempuan bisa menilai dampak pembangunan dan kebijaksanaan di bidang lingkungan hidup terhadap perempuan; lihat websitenya <http://appbindonesia.wordpress.com>.
- 4 “Gaya Hidup Perempuan Ramah Lingkungan”, *Kompas female*, Senin, 26 April 2010
- 5 “Perempuan Harus Peduli Lingkungan”, *Tempo.co*, Selasa 23 April 2013.
- 6 Tentang *Goldman Environmental Prize* ini lihat “Empat Pejuang Lingkungan Hidup Indonesia Pemenang Goldman Prize”, *Republika*, 20 April 2011.
- 7 “Mama Aleta, Peraih Goldman dari Pegunungan Molo”, *Tempo.co*, Senin, 15 April 2013.
- 8 Ibid.
- 9 Marianna Aminudin, “Sorgum dan Sera’e Di Tangan Dua Perempuan Pejuang Pangan”, www.jurnalperempuan.org/dua-perempuan-pejuang-pangan, diunduh pada 20 Desember 2013.
- 10 “Laporan Khusus: Sorgum, Potensi yang Nyaris Tak Tersentuh”, *Suara Pembaruan*, 4 Juni 2013.
- 11 Marianna Aminudin, *op.cit.*
- 12 Vandana Shiva, 1988, *Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India*, London, Zed Books Ltd., hal. 3-4.
- 13 Chris J. Cuomo, 1998, *Feminism and Ecological Communities: An Ethic of Flourishing*, London, Routledge, hal. 5-6.